

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hanif Murcholis, *Teori dan praktik pemerintahan dan otonom daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2005.
- Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2017.
- K. Bertens, *Etika, dikutip dari E.Y Kanter, Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2011.
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka refleksi, Makasar, 2010.
- Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.
- Nandang Alamsah Dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Unpad Press, Bandung, 2018.
- Padmo Wahjono. *Pembangunan hukum di Indonesia*. Jakarta, ind-hill co, 1989.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1986.
- R.J.H.M Huisman, *Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding*, (Amsterdam : Kobra, 1983).
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Suriansyah Murhani, *Aspek-Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Laksbang, Yogyakarta, 2008.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Yoyo Sudaryo, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, ANDI, Yogyakarta, 2017.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Daerah

Sumber Lainnya :

Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996

Efi Yulistyowati, *penerapan konsep trias politica dalam sistem pemerintahan republik indonesia : studi komparatif atas undang-undang dasar tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen*, Universitas Semarang, 2020

https://www.bpk.go.id/assets/files/otherpub/2020/otherpub__2020_1603673448.pdf diakses pada Rabu, 02 Agustus 2023 Pukul 15.23

<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747> diakses pada 17 Juni 2023 pukul 12.11

<https://jdih.karawangkab.go.id/> diakses pada 28 Mei 2023, Pukul 12.21

<https://opendata.karawangkab.go.id/datasets/setwan/daftar-anggota-dprd-kabupaten-karawang-berdasarkan-komisi-periode-2019-2024> Diakses pada 20 Juni 2023 pukul 13.03

<https://sekretariat.dprd-karawang.go.id/> diakses pada 28 Mei 2023 Pukul 13.41

<https://tangkar.karawangkab.go.id/> diakses pada Rabu, 02 Agustus 2023 Pukul 15.30

https://www.academia.edu/5708875/teori_kewenangan diakses pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 19.40

<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6373238/kades-di-karawang-ditangkap-usai-bayar-utang-kampanye-pakai-dana-desa> diakses pada 27 Juni 2023 Pukul 12.58

<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6078061/tersangka-korupsi-proyek-dam-di-karawang-ditahan> diakses pada 27 Juni 2023 Pukul 13.02

Philipus M Hadjon, *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta :Universitas Trisakti, 2012

Siti Nur, *Fungsi pengawasan dprd terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Maros*, Tesis Universitas Hasanudin, Makasar, 2008

Sri Nur Hari Susanto, *Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan, Administrative Law & Governance, Journal*. Volume 3 Issue 3, Semarang, 2020